KINERJA ANGGARAN PADA KEGIATAN PERJALANAN DINAS DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2017-2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Mita Agustiana Rusmala Sari
NIM. 07011281621092

Konsentrasi Keuangan Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
April 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PADA KEGIATAN PERJALANAN DINAS DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2017-2019

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MITA AGUSTIANA RUSMALA SARI
07011281621092

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2021

Pembimbing I

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Kinerja Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 22 April 2021.

Indralaya, April 2021

Ketua

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
   NIP. 197705122003121003 .....

Anggota

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
   NIP. 198106082008122002 .....

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
   NIP. 196511171990031004 .....

4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
   NIP. 198108272009121002 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

iii

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

"***Beware Of Little Expenses. A Small Leak Will Sink A Great Ship***."

(Benjamin Franklin)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahku Drs. Hoktoni Gumanurhaman, M.Si dan Ibuku Mardiana
- ✓ Keluargaku
- ✓ Tim Riset, Akreditasi dan Laboratorium Administrasi Publik
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku
- ✓ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-NYA jualah saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kinerja Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019" ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tersusunnya skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dengan adanya semangat, bantuan, serta bimbingan sehingga semua hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semua dukungan, semangat, bantuan, dan bimbingan kepada penulis antara lain :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Keluarga penulis, Terkhususnya Orang Tua Ayah dan Ibu, Drs. Hoktoni Gumanurhaman, M.Si., dan Mardiana yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Kgs. M Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Terima kasih kepada bapak Zailani Surya Marpaung., S.Sos., MPA. dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sriwijaya
5. Terima kasih kepada bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dwi Mirani S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak nasihat, dorongan, serta waktunya kepada penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA. yang telah banyak membantu memberikan arahan kepada saya selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada bapak H. Edison, S.Sos., M.Si. selaku kepala dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian di dinas yang beliau pimpin.

8. Terima kasih kepada bapak Dedi Supriadi, SE., selaku kasubbag keuangan dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan, masukan, bimbingan, mengizinkan, serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada bapak Oka Pratama, SE., MM. selaku kasubbag TU UPTD BLK dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang telah banyak membantu untuk menjadi informan penelitian serta memberikan arahan, masukan bimbingan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
10. Terima kasih kepada ibu Rini Fabiola, SKM., M.Kes. selaku kasi pelatihan dan instruktur dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang telah banyak membantu untuk menjadi informan penelitian serta memberikan arahan, masukan bimbingan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
11. Terima kasih kepada ibu Hena Indra Puspita SE. selaku bendahara dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang telah banyak membantu untuk menjadi informan penelitian serta memberikan arahan, masukan bimbingan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
12. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016 khususnya kampus Indralaya, semoga kesuksesan serta keberhasilan menghampiri kita semua
13. Terima kasih juga kepada semua pihak yang ikut andil dalam membantu selama proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, April 2021

Mita Agustiana Rusmala Sari

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kinerja Anggaran pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaaan Kota Palembang Tahun 2017-2019. Hal yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja anggaran pada perjalanan dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang apakah baik atau tidaknya anggaran tersebut digunakan sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perjalanan dinas, sehingga hal tersebut perlu diteliti dengan mengguakan teori *Value For Money* Mardiasmo. Pada teori tersebut menjelaskan bagaimana pengelolaan organisasi terkhusus anggaran yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dari penelitian ini, kinerja anggaran pada perjalanan dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tahun 2019 adalah tahun yang memiliki nilai lebih ekonomis dibanding tahun – tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 dengan nilai 94.69% adalah tahun yang nilai efisiensinya lebih efisien dibanding tahun sebelum dan setelahnya. Adapun untuk nilai efektivitas, pada tahun 2019 adalah tahun yang memiliki nilai 94.61% yang berarti efektif dan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, memiliki nilai lebih efektif. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa kegiatan yang dilakukan hendaknya Dinas Ketenagakerjaan kota Palembang melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional pada perjalanan dinas yang dilakukan, dan perjalanan dinas yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan *ouput* dan *input* yang lebih maksimal demi menghasilkan *outcome* yang maksimal dan baik.

Kata Kunci: Kinerja Anggaran, Perjalanan Dinas, *Value For Money*

Pembimbing 1

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si.
NIP. 197705122003121003

Pembimbing 2

Dwi Mirani, S.IP.,M.Si.
NIP.198106082008122002

Indralaya, April 2021
Ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009012002

ABSTRACT

This title of the research is "Budget Performance on Official Work Travel in Employment Agency of Palembang City in 2017-2019". This research aims to analyze budget performance on official work travel in employment agency of Palembang city in 2017-2019. The background thing on this research is how budget performance on official work travel in employment agency of Palembang city in 2017-2019, is that good enough or not that budget that used withing Mardiasmo Value For Money theory. In that theory explained how to manage organization especially on budgeting based on three elements, there are economy, efficiency, and effectiveness. The method that used through descriptive qualitative approach. Based on the result which is conducted on this research, budget performance on official work travel in employment agency of Palembang city from economy value, that 2019 had more economic that the previous years. Then on efficiency value, 2018 with 94.69% score had more efficiency than previous year and the year after. As for in 2019 was more effective then two years before, with 94.61% score on effectiveness value. The results of this research recommended employment agency of Palembang city when do official work travel, all the activities that will be held should do saving budget and expected to produce maximum of output and input for the sake of producing more and good outcome later.

Keywords : Budget Performance, Official Work Travel, Value For Money

Advisor I

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si.
NIP. 197705122003121003

Advisor II

Dwi Mirani, S.IP.,M.Si.
NIP.198106082008122002

Indralaya, April 2021
Chairman Of Public AdministrationDepartment
Faculty Of Social and Political Science
Sriwijaya University

Zainal Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009012002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR..... v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR..... xi
DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian..... 9
D. Manfaat Penelitian..... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 11
1. Keuangan Negara..... 11
2. Kinerja Anggaran..... 12
1) Definisi Kinerja 12
2) Definisi Anggaran 13
3) Kinerja Anggaran 13
3. Teori Kinerja Anggaran..... 14
1) Konsep Umum *Value For Money*..... 14
2) Pengukuran Kinerja 3E (Ekonomi, Efisiensi,Efektivitas)..... 16
4. Mekanisme Pembiayaan Perjalanan Dinas..... 20
1) Pengertian Perjalanan Dinas..... 20
2) Ketentuan Perjalanan Dinas..... 20
3) Tujuan Perjalanan Dinas..... 21
4) Mekanisme Pembiayaan Perjalanan Dinas..... 22
B. Penelitian Terdahulu..... 30
C. Kerangka Pemikiran 32
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 33
B. Definisi Konsep 34
C. Fokus Penelitian 35
D. Jenis dan Sumber Data 36

E. Informan Penelitian 37
F. Teknik Pengumpulan Data 37
G. Teknik Analisis Data 38
H. Sistematika Penulisan 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
1. Sejarah Singkat Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 42
2. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 43
3. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 43
4. Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 48
B. Kinerja Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019 60
1. Ekonomi 61
2. Efisiensi 66
3. Efektivitas 70
C. Hasil Temuan Penelitian 75
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang..... 5
Tabel 1.2 Realisasi Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 6
Tabel 1.3 Pagu Anggaran Kegiatan Perjalanan Dinas..... 7
Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Ekonomi 18
Tabel 2.2 Klasifikasi Pengukuran Efisiensi..... 19
Tabel 2.3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 19
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu..... 30
Tabel 3.1 Fokus Penelitian 36
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan..... 47
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Honorer 47
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Fungsional Ketenagakerjaan 48
Tabel 4.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan..... 48
Tabel 4.5 Klasifikasi Pengukuran Ekonomi 61
Tabel 4.6 Perhitungan Ekonomi Perjalanan Dinas..... 62
Tabel 4.7 Klasifikasi Pengukuran Ekonomi pada Perjalanan Dinas 64
Tabel 4.8 Klasifikasi Pengukuran Efisiensi..... 66
Tabel 4.9 Rencana dan Realisasi Jumlah Perjalanan Dinas 67
Tabel 4.10 Pengukuran Efisiensi Perjalanan Dinas..... 68
Tabel 4.11 Klasifikasi Pengukuran Efisiensi pada Perjalanan Dinas..... 69
Tabel 4.12 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 70
Tabel 4.13 Rencana dan Realisasi Jumlah Kerja sama/Kesepakatan..... 71
Tabel 4.14 Pengukuran Efektivitas Perjalanan Dinas 72
Tabel 4.15 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Perjalanan Dinas 74
Tabel 4.16 Temuan Penelitian..... 75

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Value For Money Secara Termatik..... 16
Gambar 2.2 Prinsip dari Perjalanan Dinas..... 27
Gambar 2.3 Perincian Kewajiban Atasan Pelaksana SPD 28
Gambar 2.4 Perincian Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen..... 28
Gambar 2.5 Perincian Kewajiban Pelaksana SPD..... 29
Gambar 2.6 Perincian Pembatalan Pembiayaan Perjalanan Dinas..... 29
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran 32
Gambar 4.1 Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang..... 42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 44
Gambar 4.3 Surat Perjalanan Dinas..... 64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Surat Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palembang (Kesbangpol)
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
7. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing I
8. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembimbing II
9. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembahas
10. Lembar Revisi Seminar Proposal Pembahas
11. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
12. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
13. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembimbing I
14. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembimbing Ii
15. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembahas
16. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembahas
17. Pedoman Wawancara
18. Daftar Rincian Perjalanan Dinas Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019
19. Contoh Surat Perjalanan Dinas
20. Daftar Paket Pelatihan Tahun 2018 Blk Disnaker Kota Palembang
21. Daftar Paket Pelatihan Tahun 2019 Blk Disnaker Kota Palembang
22. Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
2. APBN : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
3. ASN : Aparatur Sipil Negara
4. BLK : Balai Latihan Kerja
5. CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
6. Disnaker : Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
7. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Kasubbag : Kepala Sub Bagian
9. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
10. PA : Pengguna Anggaran
11. PAD : Pendapatan Asli Daerah
12. PNS : Pegawai Negeri Sipil
13. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
14. SPD : Surat Perjalanan Dinas
15. SPT : Surat Perintah Tugas
16. TU : Tata Usaha
17. UPTD : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
18. VFM : *Value For Money*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11, Pegawai ASN bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan
2. Memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun peran ASN tertuang dalam pasal 12 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwasannya Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian, efisien serta akuntabilitas, dilakukan sebuah rangkaian kerja yang dinamakan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan asal instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bersifat rutinitas dan kembali ketempat kedudukan semula. Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas diperlukan Surat Perintah Tugas (SPT) yang berupa dokumen yang menjadi dasar pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Adapun Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala SKPD menerbitkan dokumen berupa Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai tidak tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas tentu memerlukan biaya dan menjadi beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat bahwa biaya Perjalanan Dinas bersumber dari uang rakyat maka setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas haruslah sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan negara. Perjalanan Dinas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Perjalanan Dinas dibebankan pada APBN dengan memperhatikan prinsif selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementrian Negara/Lembaga, efisiensi penggunaan belanja negara, akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas serta pembebanan biaya. Tujuan peraturan ini adalah agar PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas, diwajibkan menyampaikan

seluruh pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas atas dasar *at cost* atau segala pengeluaran didasarkan atas jumlah pengeluaran yang sesungguhnya (*real cost*). Biaya Perjalanan Dinas yang bersumber dari negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diemban. Perjalanan Dinas adalah perihal bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain karena bekerja. Dalam pelaksanaannya, karena perpindahan tersebut memerlukan biaya – biaya maka kepada pegawai diberikan fasilitas perjalanan dinas berupa uang harian, uang transportasi, dan penginapan (jika diperlukan). Pada prinsipnya, fasilitas tersebut merupakan biaya karena tidak bersifat menambah penghasilan(Swandana,2017). Komponen biaya perjalanan dinas telah diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pasal 8 yang menjabarkan biaya perjalanan dinas jabatan. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:

1. Uang harian, terdiri atas uang makan, transpor lokal, dan uang saku
2. biaya transpor, terdiri atas Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan/kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan, dan retribusi yang dipungut
3. biaya penginapan yaitu biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya
4. uang representasi yang dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II
5. sewa kendaraan dalam kota untuk pejabat negara yang sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak
6. biaya menjemput /mengantar jenazah.

Besaran biaya untuk masing – masing komponen biaya perjalanan di atas diatur dalam bentuk peraturan menteri keuangan tentang standar biaya masukan untuk setiap tahun anggaran.

Kota Palembang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah setelah Medan. Terpilihnya kembali H. Harnojoyo selaku Walikota Palembang, membentuk sebuah visi pembangunan kota Palembang sampai dengan tahun 2023 berupa "PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023". Emas yang menjadi visi mengandung makna Elok Madani, Aman dan Sejahtera sedang Darussalam mengandung arti kota Palembang menjadi kota yang Aman, Damai, Tentram, Makmur dan Sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Bertujuan dengan visi misi kota Palembang, untuk melakukan pembangunan kota Palembang, terbentuklah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Palembang sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Ketenagakerjaan di kota Palembang merupakan bagian tak terpisah dari pembangunan kota Palembang yang tidak terpisah dari pembangunan regional Sumatera Selatan Dan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perjalanan Dinas
3. Efisien penggunaan belanja daerah, dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas sendiri terbagi tiga meliputi; Pejalanan Dinas Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Setiap Perjalanan Dinas tersebut memiliki ketentuan pola pelaksanaan dan pembiayaan dalam pelaksanaannya. Apabila dalam pelaksanaannya tidak berpedoman dengan kaidah – kaidah yang telah diatur, maka prinsip dan tujuan awal dari terlaksananya Perjalanan Dinas dapat terabaikan dan mendapatkan kendala – kendala kedepannya. Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
2. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Dapat dikatakan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dengan terlaksananya Perjalanan Dinas bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kinerja dari dinas tersebut demi terlaksananya pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya bidang ketenagakerjaan.

Tabel 1.1 Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Penyerapan(%)
2017	3.563.606.401	3.289.794.988	92.32
2018	4.453.606.401	4.210.477.444	94.54
2019	6.147.000.000	5.460.564.450	88.83

Sumber Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat jika Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar Rp.3.563.606.401, pada tahun 2018 sebesar 4.453.606.401 dan pada tahun 2019 sebesar 6.147.000.000. Adapun untuk realisasi anggarannya sendiri pada setiap tahunnya hampir menyentuh angka 100 dalam penyerapannya. Akan tetapi, pada tahun 2019 realisasi penyerapan anggarannya menurun dari tahun 2018 dengan besaran

persentase 5.71%. Secara keseluruhan penyerapan anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang sudah baik karena hampir menyentuh angka 100.

Dalam laporan kemajuan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, memuat rincian program/kegiatan yang menggunakan anggaran dari Dinas Ketenagakerjaan kota Palembang itu sendiri. Salah satu program/kegiatan yang dilakukan oleh Disnaker Kota Palembang adalah Rapat – Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah atau lebih dikenal dengan Perjalanan Dinas.

Tabel 1.2 Realisasi Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas di Dinas Ketanagakerjaan Kota Palembang

Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Penyerapan(%)
2017	440.077.000	439.034.787	99.76
2018	584.000.000	581.448.975	99.56
2019	700.000.000	626.283.753	89.47

Sumber Laporan Kemajuan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat besaran anggaran dan realisasi anggaran dari kegiatan Perjalanan Dinas. Sama halnya dengan Anggaran global/keseluruhan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, anggaran untuk kegiatan Perjalanan Dinas pun demikian. Penyerapan anggaran yang baik karena sudah mendekati angka 100 setiap tahunnya, tapi pada tahun 2019 mengalami penurunan persentase sebesar 10.09%. Pada tahun 2018 realisasi anggarannya sebesar Rp.581.448.975, sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggarannya sebesar Rp.626.283.753 yang jelas peningkatannya cukup signifikan karena anggaran untuk perjalanan dinas naik dari tahun – tahun sebelumnya. Akan tetapi, persentase realisasi anggarannya menurun, padahal anggaran yang ada untuk Perjalanan Dinas selalu membesar tetapi penyerapannya turun cukup signifikan.

Tabel 1.3 Pagu Anggaran Kegiatan Perjalanan Dinas

Tahun	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan(Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan(Rp)	Penambahan(Rp)
2018	400.000.000	584.000.000	184.000.000
2019	500.000.000	700.000.000	200.000.000

Sumber Laporan Kemajuan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang

Adapun pada pagu anggaran yang menunjukkan peningkatan penambahan cukup signifikan, terutama pada tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000. Pada tahun 2018 sebesar Rp.184.000.000. Perubahan pagu yang cukup signifikan ini mengindikasi bentuk pemborosan dalam kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang.

Pada organisasi sektor publik, kinerja adalah gambaran suatu pencapaian dari kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, kinerja keuangan sendiri merupakan hal yang menjadi isu yang menarik lagi penting di organisasi sektor publik. Jalannya pemerintahan dituntut untuk mengasilkan kinerja keuangan yang baik tanpa adanya hal – hal yang dianggap bisa merugikan dalam penggunaan anggaran yang mana bersumber dari uang rakyat (APBN/APBD). Tuntutan untuk terlaksananya *good governance* dan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, diharapkan dapat mengurangi ataupun menghentikan terjadinya penyelewengan dana, pemborosan dan dapat terdeteksinya program – program/kegiatan yang tidak layak secara prinsip ekonomis. Alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu pertanggungjawaban dari instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya dengan melakukan perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi *input, output, outcome, impact* dan kemanfaatannya(Ardila & Putri, 2015). Untuk

menilai kinerja anggaran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dapat memperhatikan *Value For Money* dalam pelaksanaannya.

Value For Money dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2018:142) adalah sebuah alat ukur untuk menimbang pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Ekonomi : Menggunakan *input* berdasarkan dengan penentuan mutu dan jumlah pada nilai terendah. Halnya ekonomi merupakan komparasi antara *input* dengan harga *input.* Ekonomi mengaitkan pada kemampuan organisasi sektor publik dengan *input resource* yang serendah – rendahnya yaitu tmenjauhi pengeluaran yang tidak perlu dan berlebihan.
2. Efisiensi : Penerimaan *output* yang sebesar - besarnya pada *input* tertentu. Pada prinsip efisiensi membandingkan *input* dengan output berdasarkan standar kinerja yang ada.
3. Efektivitas : Menginginkan ketepatan nilai pencapaian hasil kegiatan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pada efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output* yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka pelasanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan rapat, seminar dan sejenisnya dan mengikuti pendidikan dan pelatihan diharapkan penggunaan anggaran yang dapat baik dan profesional, supaya terjadi kesesuaian penggunaan anggaran yang proposional sehingga terwujudnya kegiatan/program yang dapat memberikan kegunaan baik bagi masyarakat, terutama pada bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendasarkan setiap program /kegiatan yang menggunakan anggaran harus bersesuaian dengan prinsip *Value For Money.* Penyerapan anggaran yang maksimal bukan hanya salah satu indikator kinerja

anggaran dapat dikatakan baik, akan tetapi juga dengan penggunaan anggaran yang tepat guna sesuai rencana penggunaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian pada kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang serta berapa banyak kunjungan yang merupakan penunjang untuk menilai baik tidaknya kinerja anggaran pada kegiatan tersebut. Supaya terwujudnya prinsip dan tujuan dari Perjalanan Dinas, diperlukan suatu pengukuran kinerja anggaran yang bersesuaian. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ”Kinerja Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Anggaran pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tahun 2017-2019”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaaan Kota Palembang Tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai kajian yang bernilai guna untuk akademisi yang hendak melanjutkan penelitian ini dalam studi – studi Ilmu Administrasi Publik, tersendirinya pada konsentrasi Keuangan Negara.

b. Manfaat Praktis

Menggunakan penelitian ini, mampu memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tentang Kinerja Anggaran yang bersesuaian dengan prinsip *Value For Money*, supaya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pada kegiatan Perjalanan Dinas dapat berjalan lebih baik dan mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang mengacu pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Edisi 11. Diterjemahkan oleh : Nuri Hinduan dan Edward Tanujaya. Jakarta : Salemba Empat.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : STIE YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

_____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

_____. 2018. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.

Nuraeni, Nani. 2008. *Panduan Menjadi Sekretaris Profesional*. Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka.

Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta : Erlangga.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Semarang : IKIP Semarang Press.

Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfa Beta.

Wursanto, Ignatius. 2006. *Kompetensi Sekretaris Profesional*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Jurnal

Ardila, Isna. Putri Anindya, Ayu. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/ Maret 2015.

Swadana, AA Nova. 2017. *Pengaruh Kebijakan at cost Terhadap Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas*. Jurnal Penganggaran Sektor Publik vol II, p.112-126.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.